

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
DAN PROYEK STRATEGIS**

NOTA DINAS

NOMOR: PR.06/4/D.V.M.EKON.5/01/2026

Yth. : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
Dari : Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
Hal : Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 9 Januari 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudari Nomor: PR.06/16/D.V.M.EKON.1/01/2026 tanggal 12 Januari 2025 terkait Permintaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan laporan tersebut beserta dengan dokumen pendukungnya pada laman <https://kinerja.ekon.go.id> sebagai pelaporan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi
dan Proyek Strategis,



Suroto
NIP 197004121996031001

Tembusan:
Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Persentase	100%	100%	100%	100%
1.2	Indikator Kinerja 1.2 Tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional	Persentase	80%	80%	85.83%	120%
II	<i>Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas (Penugasan dari Deputi)</i>					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang	Persentase	80%	80%	100%	120%

	Pengembangan Kawasan Ekonomi					
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	Persentase	80%	80%	100%	120%
III	<i>Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas (Penugasan dari Deputi)</i>					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,93 dari 4	120%
IV	<i>Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis</i>					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Persentase	85%	85%	100%	120%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing
2. Tingkat capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing

Latar Belakang

Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing telah dinyatakan selesai secara perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah mendapatkan dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait.

KSE yang menjadi target merupakan KI, KEK, KSPN, dan/atau KPBPB yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 KSE Prioritas yang menjadi target dari 12 KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Kriteria kawasan strategis ekonomi yang diprioritaskan meliputi:

- a. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
- b. Mendukung kebijakan dan arahan Presiden;
- c. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi;
- d. Menjadi bagian dari program hilirisasi sumber daya alam.

Tercapainya target atas Indikator “Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing” didukung oleh dokumen berikut:

- a. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No. 66/2024 tentang HPT, Perpres No. 79/2024 tentang P3NK, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
- b. Nota Dinas Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
- c. Paparan terkait Progres Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
- d. Laporan Semester terhadap Hasil Evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
- e. Laporan evaluasi Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;
- f. Laporan Kepada Presiden terhadap Penyampaian Progres Peningkatan Nilai Investasi pada Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas;

Kajian Dampak Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas terhadap nasional dan regional

Target indikator ini diukur berdasarkan progres bisnis proyek KSE Prioritas yang mencapai progres fisik dan/atau administratif sesuai dengan milestone tahunan yang telah direncanakan. Capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan implementasi proyek, namun juga mencerminkan efektivitas koordinasi, pembiayaan, dan pengawasan KSEP.

Dihitung berdasarkan dengan proses bisnis pengembangan KSE dengan penyesuaian besaran status:

1. Perencanaan/Persiapan dengan bobot 30%

untuk pelaksanaan renaksi di IKU tersebut telah berhasil memenuhi target Triwulan IV tahun 2025 yang menjadi target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1. Persentase pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang berdaya saing			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi prioritas	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 8 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 6 November 2025 • Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 13-14 November 2025 • Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Series 2 dalam Rangka Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 3 Desember 2025
2.	Penyusunan laporan pelaksanaan semester 2 terkait pelaksanaan pengembangan kawasan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Audiensi dengan KI Kuala Tanjung pada tanggal 8 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan PSN Kawasan Industri Kuala Tanjung pada tanggal 30 Oktober 2025

	strategis ekonomi prioritas		
--	--------------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

4. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) pada tanggal 17 Januari 2025.
5. Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Kawasan Industri ASPIRE Stargate oleh PT Stargate Mineral Asia di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Januari 2025.
6. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tanggal 13 Februari 2025.
7. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada 14 Februari 2025.
8. Telah dilaksanakan Rapat Pengumpulan Informasi Awal atas Pengawasan Program Penguatan Investasi pada 18 Februari 2025.
9. Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025.
10. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Permohonan PKKPR di Kawasan KI IHIP pada tanggal 14 Maret 2025
11. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Lanjutan Persiapan Kunjungan Bapak Presiden RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tanggal 18 Maret 2025
12. Telah dilaksanakan Kunjungan atas Tindak Lanjut MOU PT KITB dengan CSCEC pada 17 April 2025
13. Telah dilaksanakan Pertemuan terkait Rancangan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur dan Pembiayaan Iklim yang Baru pada 28 April 2025
14. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Perluasan KEK Gresik pada 7 Mei 2025
15. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Konsep Memorandum of Understanding on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chains antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 8 Mei 2025
16. Telah dilaksanakan KIAT Technical Committee Meeting untuk Infrastructure Funding and Financing Activity Stream pada 20 Mei 2025
17. Telah dilaksanakan Acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 pada 3 Juni 2025
18. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Industri pada 25 April 2025
19. Telah dilaksanakan Kegiatan FGD Pedoman KEK Hijau pada 8 Mei 2025

20. Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada 9 Mei 2025
21. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR pada 14 Mei 2025
22. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pembuktian Alas Hak dalam rangka Kawasan Hutan pada 15 Mei 2025
23. Telah dilaksanakan Rapat Ekspose Persiapan Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada 2 Juni 2025
24. Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RAPERMEN PNBP Pelepasan Kawasan Hutan pada 5 Juni 2025
25. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 17 Juni 2025
26. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada 22 April, 8 Mei dan 3 Juni 2025
27. Telah dilaksanakan Evaluasi Kawasan Industri RPJMN 2025-2029 dan PSN dalam RKP 2026 pada 23 Juni 2025
28. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KEK Pariwisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 pada 25 Juni 2025
29. telah dilaksanakan Workshop in Eco-Industrial Park Implementation: Sharing Success & Shaping the Future pada 28 Mei 2025
30. Telah dilaksanakan FGD Revisi Pedoman KEK Hijau pada 3 Juni 2025
31. Telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada 3 Juni 2025
32. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) pada tanggal 30 Juli 2025
33. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan PSN Kawasan Industri (KI) Fakfak pada tanggal 31 Juli 2025
34. Telah dilaksanakan Pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) Pulau Obi di Maluku Utara pada tanggal 1 Agustus 2025
35. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
36. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
37. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada tanggal 1 Agustus 2025
38. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 14 Agustus 2025
39. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada tanggal 10 September 2025

40. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong pada tanggal 17 September 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

1.2. Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) mencerminkan capaian implementasi progres pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan/triwulanan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait.

Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Pembangunan PSN dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mencerminkan siklus dihasilkannya proyek strategis nasional. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proyek secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga dinyatakan selesai. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penyiapan;
3. Transaksi;
4. Konstruksi;
5. Beroperasi sebagian, dan/atau;
6. Beroperasi penuh/selesai.

Pelaksanaan PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator "Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional" didukung oleh dokumen berikut:

1. Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR)
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional

Target indikator ini diukur berdasarkan proses bisnis proyek PSN berdasarkan dengan Permenko PSN yang mencapai progres fisik dan/atau administratif sesuai dengan milestone tahunan yang telah direncanakan. Capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan implementasi proyek, namun juga mencerminkan efektivitas koordinasi, pembiayaan, dan pengawasan proyek strategis. Dihitung berdasarkan dengan tahapan proses bisnis berdasarkan dengan Permenko PSN dengan penyesuaian besaran status:

1. Konstruksi dikategorikan masuk dalam tahap 1, telah melalui proses dari mulai perencanaan, penyiapan, transaksi hingga konstruksi sehingga diberikan bobot sebesar 40%;

2. Beroperasi sebagian dikategorikan masuk dalam tahap 2, telah beroperasi secara parsial sebelum seluruh komponen selesai dibangun sehingga diberikan bobot sebesar 70%;
3. Selesai dikategorikan masuk dalam tahap 3, telah mulai beroperasi penuh sehingga diberikan bobot sebesar 100%.

Penghitungan untuk tingkat capaian pembangunan PSN =

$$\frac{\% \text{ besaran status progres PSN 1} + \% \text{ besaran status progres PSN 2} + \dots + \% \text{ progres PSN n}}{\text{Jumlah PSN}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan tahun 2025 didasarkan pada RKP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2025. Adapun target triwulan sebesar 80%. Pemilihan target ini berdasarkan proses bisnis pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV tahun 2025, tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terealisasi sebesar 85.83% yang didapatkan dari proses bisnis pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama Triwulan IV tahun 2025 dimana terealisasi sebanyak enam PSN yang telah selesai (6 dari 12 proyek). Adapun rincian realisasi Tingkat capaian pembangunan PSN hingga Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional	Persentase	80%	85.83%	120%

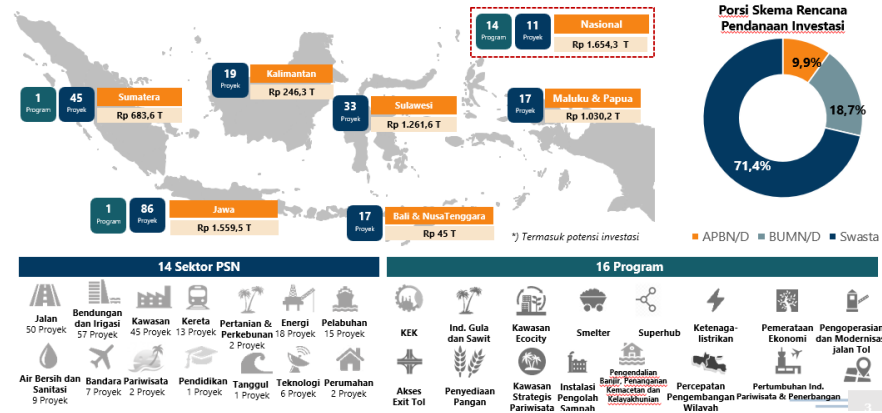
Hingga Triwulan IV tahun 2025, persentase penyelesaian PSN telah terealisasi sebesar 85.83% dengan capaian kinerja sebesar 120% yang didapatkan dari persentase jumlah PSN yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada Triwulan IV tahun 2025. Persentase penyelesaian PSN pada Triwulan IV didapatkan dari penyelesaian pembangunan 6 dari 12 proyek pada Triwulan IV Tahun 2025. Pembangunan 6 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 63,705 Triliun. Adapun 6 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor	Nilai Investasi
1.	Kawasan Industri Penebang	Kawasan	Rp 49,21 Triliun
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan	Rp 4,015 Triliun
3.	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Rp 6,06 Triliun
4.	Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi	Rp 1,8 Triliun

5.	SPAM Wasusokas	Air Bersih dan Sanitasi	Rp 1,23 Triliun
6.	Kawasan Industri Alumina Toba	Kawasan	Rp 1,39 Triliun

Overview Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Permenko Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 228 Proyek dan 16 Program sebagai PSN dengan potensi nilai investasi (Capex) Rp 6.480,5 Triliun*



Berdasarkan daftar proyek dalam Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Daftar Proyek Strategis Nasional, sampai dengan Maret 2025, terdapat 228 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi Rp 1.654,3 Triliun. Dari total 228 proyek, terdapat 114 Proyek sudah selesai sepenuhnya pada Desember 2024, 12 proyek ditargetkan selesai pada tahun 2025, dan 102 proyek ditargetkan selesai di atas 2025. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata mendorong 12 PSN agar dapat selesai di tahun 2025. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
SPAM Benteng Kobema	Air Bersih Dan Sanitasi
SPAM Wasusokas	Air Bersih Dan Sanitasi
Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi
Jalan Tol Sigli Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pelabuhan Bena	Pelabuhan
KI Kuala Tanjung	Kawasan
KI Bantaeng	Kawasan
KI Tanah Kuning	Kawasan

KI Alumina Toba	Kawasan
KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan
KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
KI Pulau Penebang	Kawasan

Pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 berjalan dengan baik sehingga adapun capaian terkait tingkat capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
2. Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
3. Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
4. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
5. Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Tingkat capaian pembangunan proyek strategis nasional diharapkan mampu menjadi stimulus dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Realisasi Triwulan IV tahun 2025 melebihi target dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024 pada realisasi kinerja Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terkait pembangunan PSN. Pada Triwulan IV tahun 2025 telah terealisasi 85.83% (6 dari 12 proyek) sedangkan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu 100% (41 dari 41 proyek) dilihat dari capaian unit kerja lama yaitu Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan formula penghitungan pembangunan PSN dimana dalam perwujudan tingkat capaian pembangunan PSN ini dihitung berdasarkan dengan proses bisnis pembangunan PSN dari 12 PSN sedangkan formula pada tahun lalu didasarkan dengan persentase penyelesaian pembangunan PSN yang didapatkan dari jumlah penyelesaian pembangunan PSN.

Belum tercapainya target PSN sesuai dengan realisasi disebabkan oleh beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dinamika koordinasi dengan badan usaha, proses perizinan yang masih berjalan, serta penyesuaian terkait pemenuhan aspek tata ruang dan pelepasan kawasan hutan. Selain hal tersebut, terdapat kendala yang disebabkan oleh:

1. Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi

Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.

2. Belum terselesaikannya beberapa regulasi yang membutuhkan penyesuaian dengan tugas fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih.
3. Efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya dukungan dana bagi kegiatan pengembangan kawasan ekonomi.

Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian dalam realisasi capaian PSN per triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi dalam lapangan sehingga terdapat beberapa hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian Perindustrian bahwa Kawasan Industri (KI) Kendari masih menghadapi permasalahan internal pada badan usaha, sehingga penyelesaian proyek pada tahun 2025 belum memungkinkan. Namun demikian, dalam rangka tetap mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat PSN Kawasan Industri yang dapat didorong penyelesaiannya pada tahun 2025, yaitu Kawasan Industri Alumina Toba.
2. Untuk ruas Tol Sigli–Banda Aceh, secara fisik konstruksi main road telah selesai dan telah difungsikan secara terbatas sebagai jalan tol fungsional pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, masih terdapat pekerjaan pelandaian lereng yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pembebasan lahan. Namun, untuk dapat dikategorikan sebagai PSN yang selesai, masih terdapat tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pemenuhan sertifikasi kelayakan operasional dan pengoperasian secara penuh. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.
3. Untuk SPAM Benteng Kobema, pekerjaan konstruksi telah selesai dan saat ini sedang dilakukan tahapan pengujian dan commissioning. Proses pengujian masih berlangsung karena kapasitas layanan yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan kebutuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.

Pencapaian target ini didorong oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, monitoring dan evaluasi secara berkala serta pelaksanaan tinjauan lapangan sehingga target pada tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2. Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada tanggal 2 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rencana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 17 Des 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 19 Des 2025.
2.	Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 Okt 2025 • Telah dilaksanakan Seminar Rencana Implementasi Kelembagaan P3NK pada tanggal 25 Nov 2025.
3.	Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat (PDSK) Untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa pada tanggal 9 Des 2025. • Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi dan Evaluasi

			Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa pada tanggal 12 Des 2025.
4.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi melalui media digital https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/143000021/ini-daftar-lengkap-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan PSN Sektor Kawasan pada tanggal 9 Januari 2025 dan 16 Januari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Penambahan Pengadaan Tanah Proyek PSN Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada tanggal 13 Januari 2025.
- c. Telah dilaksanakan Rapat Usulan Realokasi Lintas Sektor Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2025.
- d. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan Word Bank terkait Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025.
- e. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan Word Bank terkait Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025.
- f. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, dan Tanggul Laut) Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2025.
- g. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi dan Teknologi pada tanggal 16 Januari 2025.
- h. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Januari 2025
- i. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Transportasi pada tanggal 21 Januari 2025
- j. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Jalan Tol pada 22 Januari 2025.
- k. Telah dilaksanakan siaran Pers melalui website ekon.go.id terkait evaluasi periodik capaian PSN, termasuk Tropical Coastland di Banten oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 22 Januari 2025.
- l. Telah dilaksanakan Rapat Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2026 pada tanggal 30 Januari 2025.
- m. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Air Minum, Air Baku dan Sanitasi Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025.
- n. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup PSN sektor Bina Marga di Kawasan Perbatasan dan IKN pada tanggal 7 Februari 2025.
- o. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Ketapang pada tanggal 12 Februari 2025
- p. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (KI IGIP) pada tanggal 13 Februari 2025.

- q. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 24 Februari 2025.
- r. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Maret 2025.
- s. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 4 Maret 2025.
- t. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN Kawasan Industri Indonesia Huali Indonesia Park (KI IHIP) pada tanggal 20 Maret 2025.
- u. Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil revisi Peraturan Menteri Koordinator terkait daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
- v. Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2024 kepada Presiden.
- w. Dalam pelaksanaan perubahan Perpres mengenai tata kelola dan kelembagaan KPPIP, telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi atau diskusi pembahasan terkait revisi Perpres pada tanggal 24 dan 30 April 2025 dan rapat lanjutan pembahasan revisi Peraturan Presiden tentang KPPIP pada tanggal 14 Mei 2025.
- x. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN KI Indonesia Huali Industry Park terkait pembahasan Debottlenecking Pembangunan KI IHIP pada tanggal 24 April 2025.
- y. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada tanggal 30 April 2025.
- z. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan Pengesahan Hasil Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Aceh pada tanggal 4 Juni 2025
- aa. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Indikasi Tumpang Tindih Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Juni 2025.
- bb. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Deliniasi Kawasan PSN pada tanggal 13 Juni 2025.
- cc. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pelepasan Kawasan Hutan pada PSN Industri Pengolahan Bauksit PT DSM pada tanggal 26 Juni 2025.
- dd. Telah dilaksanakan Diskusi HPT dengan PT PII pada tanggal 5 Mei 2025.
- ee. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Pipeline HPT pada tanggal 16 Mei 2025
- ff. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden pada tanggal 5 Mei 2025
- gg. Telah dilaksanakan Kick off Meeting Permenko P3NK pada tanggal 2 Juni 2025
- hh. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Progres PSN di IKN yang Didanai oleh LMAN pada tanggal 29 Juli 2025
- ii. Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor Jalan Tol pada tanggal 20 Agustus 2025
- jj. Telah dilaksanakan Monthly Meeting Pendanaan Lahan PSN oleh LMAN (Juni-Juli 2025) Sektor KA pada tanggal 21 Agustus 2025

- kk. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
- ll. Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional pembangunan Flyover dari dan menuju terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025.
- mm. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi informasi Proyek Strategis Nasional sektor benudngan dan irigasi pada tanggal 1 Agustus 2025
- nn. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada tanggal 7 Agustus 2025
- oo. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi Proyek Strategis Nasional pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2025
- pp. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan evaluasi Program PSN pengembangan Jalan Perbatasan pada tanggal 10 September 2025
- qq. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
- rr. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan status dan perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 21 Juli 2025
- ss. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Permenko terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 September 2025
- tt. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada 29 September 2025
- uu. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Identifikasi Potensi Lokasi Penerapan Skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 25 September 2025
- vv. Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi Hak Pengelolaan Terbatas Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus 2025
- ww. Pemberitaan terkait Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur melalui website aksespelabuhan.co.id

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Untuk progres penyusunan perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dituangkan dalam permenko, saat ini masih dalam

pembahasan bersama K/L terkait. Selain itu, Asdep PKEPS saat ini masih melakukan proses evaluasi terhadap usulan baru maupun proyek-proyek eksisting, termasuk penilaian terhadap proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN.

2. Untuk progress revisi Perpres KPPIP, saat ini proses revisi Perpres KPPIP masih dalam proses persiapan administratif dan koordinasi lintas lembaga sebelum dapat diajukan secara formal.
3. Adanya hambatan teknis dalam pelaksanaan dan isu pengadaan tanah yang masih berproses (tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, tanah di kawasan hutan dan tanah instansi) baik dari segi regulasi dan pelaksanaan di lapangan.
4. Adanya hambatan terkait kebutuhan penambahan anggaran/ pendanaan proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait dimana rapat koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan substansi, menjaring masukan teknis, dan memastikan dukungan serta kesepahaman lintas instansi terhadap arah revisi kebijakan.
2. Melakukan koordinasi lanjutan jika terjadi debottlenecking dalam pembahasan. Apabila terdapat hambatan atau perbedaan pandangan dalam proses pembahasan, maka akan dilakukan koordinasi kembali dengan KL terkait guna mencari solusi dan memastikan proses tetap berjalan sesuai target.
3. Perlunya rapat koordinasi dengan stakeholder terkait isu pengadaan tanah dan proses perizinan.
4. Perlunya alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan penyelesaian PSN.
5. Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
6. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi
2. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

Latar Belakang

Terwujudnya efektivitas kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan kawasan ekonomi; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan ekonomi; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

1. Undangan rapat dan Daftar Hadir;
2. Notula/ Risalah/ Berita Acara;

3. Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notula Rapat Monitoring dan Evaluasi Kawasan Industri, dst.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
2. konsep Alternatif Kebijakan dan Program
3. undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Dokumen Kajian Alternatif Pembiayaan Infrastruktur, dst.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
2. rumusan kelembagaan,
3. rumusan perencanaan program,
4. rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Revisi Permenko 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan KPBPB BBK, dst.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general

adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
2. Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
3. Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
4. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
5. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
6. Kertas Kerja Kebijakan
7. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya *Piloting Project* LVC di kota Bandung, dst.

Untuk mendapatkan hasil kinerja dalam indikator kinerja ini, dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan tahun 2025 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2025. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 80%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator kinerja 2.1 yaitu Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan

di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi yaitu sebesar 100% mencapai 120% dari target Triwulan III Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	Persentase	60%	100%	120%

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi diukur berdasarkan tingkat keberhasilan atas empat rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan
2. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kawasan ekonomi
3. Rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan kawasan ekonomi
4. Rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan

Rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung peraturan terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 yang telah memasuki tahapan keempat. Realisasi dari tahapan ini adalah melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang.

Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kawasan ekonomi dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan penyusunan peraturan terkait KIT Batang yang telah memasuki tahapan keempat. Realisasi dari tahapan ini adalah melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh stakeholder sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang. Realisasi perumusan rekomendasi kebijakan ini menyesuaikan dengan perubahan status KIT Batang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena

adanya arahan dari Presiden RI dimana perubahan status ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan Kawasan ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan penyusunan peraturan terkait pedoman juknis *Land Value Capture* (LVC) yang telah memasuki tahapan keempat. Asdep PKEPS telah menetapkan rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan melalui Rancangan Permenko Juknis terkait LVC dengan Kementerian Teknis terkait dan sudah dalam tahap pleno harmonisasi. Realisasi tahapan ini adalah melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang.

Rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Kawasan strategis ekonomi terkait pengembangan Kawasan Rebana yang telah memasuki tahapan keempat. Asdep PKEPS telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan melalui Rancangan Master Plan Pengembangan Kawasan Rebana dengan JICA, Kementerian Teknis, dan Pemerintah Daerah terkait. Realisasi dari tahapan ini adalah melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang.

Nilai Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Empat rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan pertama, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20 = \frac{4}{4} \times 20 = 20$$

2. Empat rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan kedua, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25 = \frac{4}{4} \times 25 = 25$$

3. Empat rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan ketiga, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27.5 = \frac{4}{4} \times 27.5 = 27.5$$

4. Empat rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan empat, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27.5 = \frac{4}{4} \times 27.5 = 27.5$$

5. Kemudian menghitung Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas SKP} = 20\% + 25 + 27.5 + 27.5\% = 100\%$$

Realisasi Triwulan IV didorong oleh tingginya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi yang membuat target pada tahun 2025 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pengembangan kawasan ekonomi terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat monitoring dan evaluasi rekomendasi kebijakan terkait percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi sebagai finalisasi penyusunan rekomendasi kebijakan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Joint-Investment Forum 2025 pada tanggal 3 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Banten Investment Forum Tahun 2025 pada tanggal 21 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian / Lembaga Terhadap Penyelesaian Terhadap Nilai Penggantian Biaya Investasi (PBI) pada Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani untuk Pembangunan SUTT 150 kV KIT Batang - Incomer (Batang

			<p>New - Weleri) pada tanggal 22 Oktober 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Seminar Pengembangan Investasi di Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun pada tanggal 28 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa dan Narasumber Diseminasi Hasil Kajian Investasi Sektor Manufaktur di Wilayah Jawa pada tanggal 4 November 2025 • Telah dilaksanakan FGD Dukungan Infrastruktur dan Kesiapan Lokasi untuk Investasi Komplek Petrokimia Terpadu ExxonMobil pada tanggal 5 November 2025 • Telah dilaksanakan CEO Talks pada 7th West Java Investment Summit 2025 pada tanggal 14 November 2025 • Telah dilaksanakan Joint Investment Promotion Event : A Business Forum on Investment Opportunities and Business Regulations in the Batam, Bintan, and Karimun (BBK) Free Trade Zone pada tanggal 18 November 2025 • Telah dilaksanakan Indonesia SEZ Investment Summit and Award (SEZ-ISA) 2025 pada tanggal 9 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Investasi KEK Mandalika, Likupang, dan Morotai pada tanggal 18 Desember 2025
2.	Rapat monitoring dan evaluasi rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kawasan ekonomi sebagai finalisasi penyusunan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Lintas Sektor pada tanggal 27 Oktober 2025, 26 November 2025, 11 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Pengembangan Kawasan untuk Pengembangan Industri dan

	rekomendasi kebijakan		<p>Perekonomian di Provinsi Riau pada tanggal 3 Oktober 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri pada tanggal 14 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis terkait Kawasan Berorientasi Transit pada tanggal 18 November 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Kompilasi dan Dokumentasi Akhir Hasil Kegiatan Penelitian Terpadu Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Papua Selatan pada tanggal 20-21 November 2025 • Telah dilaksanakan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PT Pindad pada tanggal 4 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata pada tanggal 18 Desember 2025
3.	Rapat monitoring dan evaluasi rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan kawasan ekonomi sebagai finalisasi penyusunan rekomendasi kebijakan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Diskusi Pendalaman Substansi Penyusunan Buku Saku Pembiayaan Alternatif Bagi Pemerintah Daerah Vol.2 pada 4 November 2025 • Telah dilaksanakan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah pada 6 November 2025 • Telah dilaksanakan FGD terkait Skema KPDBU sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif daerah

			<p>pada tanggal 26 November 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Diseminasi Buku Saku dan Petunjuk Teknis Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Kota Berkelanjutan pada tanggal 22 Desember 2025
4.	Rapat monitoring dan evaluasi rekomendasi kebijakan terkait penanganan dampak sosial dan dukungan perencanaan dalam Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi sebagai finalisasi penyusunan rekomendasi kebijakan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan PDSK untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa pada tanggal 10 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Pemaparan Rencana Bisnis Kawasan Wisata Reog Ponorogo Park pada tanggal 7 Januari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Paparan World Bank terkait LVC di DKI pada tanggal 13 Januari 2025.
- c. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Agenda *Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port* Tahun 2025 pada tanggal 14 Januari 2025.
- d. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Alternatif Skema Pembiayaan Monumen Reog dan Museum Peradaban oleh Kemenkeu pada 22 Januari 2025.
- e. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Skema Pembiayaan JUTPI-3 pada tanggal 30 Januari 2025.
- f. Telah dilaksanakan Workshop Penanganan Dampak Sosial Masyarakat - Implementasi Proyek yang Dibiayai ADB pada 6 Februari 2025.
- g. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Urgensi (dampak/manfaat), Peta Jalan, Masterplan dan Pembiayaan Pembangunan Kotabaru Lampung pada tanggal 12 Februari 2025.
- h. Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi atas Jangka Waktu Pemenuhan Pembiayaan untuk Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka pada tanggal 18 Februari 2025.

- i. Telah dilaksanakan Konsultasi Rencana Rinci KPBPB Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2025.
- j. Telah dilaksanakan Audiensi BP Bintan dan Pemkab Bintan terkait Penyusunan Rencana Rinci BBK pada tanggal 26 Februari 2025.
- k. Telah dilaksanakan Diskusi Penyelarasan Konsep Desain pada ke-3 Lokasi Pilot Project - JUTPI 3.
- l. Telah dilaksanakan Diskusi Pengumpulan Informasi Awal dan Penyusunan Desain Pengawasan dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Pembiayaan Non Utang (KPBU) pada tanggal 5 Maret 2025.
- m. Telah dilaksanakan Audiensi dan Pertemuan Awal Kajian terkait Implementasi UU Jaminan Produk Halal pada Kawasan Industri pada tanggal 7 Maret 2025.
- n. Telah dilaksanakan FGD Program dan Kebijakan Pembangunan di KSN Kawasan Selat Sunda pada tanggal 13 Maret 2025.
- o. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan LVC dan DPL dengan World Bank pada tanggal 14 Maret 2025.
- p. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Lanjutan Persiapan Kunjungan Bapak Presiden RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tanggal 18 Maret 2025.
- q. Telah dilaksanakan Audiensi dengan BP Tanjung Minang pada 20 Maret 2025.
- r. Telah dilaksanakan *Desk* Keterpaduan Infrastruktur tentang Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan 8% (*Case Study* Pulau Jawa: Kawasan Rebana) Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur pada tanggal 20 Maret 2025.
- s. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Non PSN *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 24 Maret 2025.
- t. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Proyek Non PSN *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Mei 2025.
- u. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Telantar pada tanggal 22 Mei 2025.
- v. Telah dilaksanakan Rapat tindak lanjut Dukung Atas Walkability Vision Workshop pada Program JUTPI-3 pada tanggal 28 Mei 2025.
- w. Telah dilaksanakan Kick off Meeting Permenko P3NK pada tanggal 2 Juni 2025.
- x. Telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal 3 Juni 2025.
- y. Telah dilaksanakan Workshop Dashboard JUTPI-3 dengan DITM Kemenhub pada tanggal 12 Juni 2025.
- z. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kantor Bersama KPBU tentang Daftar Rencana KPBU dan PPP Book Tahun 2025 pada tanggal 13 Juni 2025.
- aa. Telah dilaksanakan Pelatihan JUTPI-3 Future Public Transport Dashboard pada tanggal 17 Juni 2025.

- bb. Telah dilaksanakan The 2nd JCC Meeting of Project for Rehana Area Development which us related to Patimban International Port pada tanggal 17 Juni 2025.
- cc. Telah dilaksanakan The Final JCC Meeting of JUTPI-3 pada tanggal 24 Juni 2025.
- dd. Telah dilaksanakan Kelembagaan dan Tata Kelola LVC, Fondasi Pendanaan Pembangunan Kota Jakarta pada tanggal 26 Juni 2025.
- ee. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Land Value Capture pada tanggal 11 Juli 2025
- ff. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada tanggal 23 Juli 2025
- gg. Telah dilaksanakan Diskusi Teknis Perencanaan Teknis Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Bintan Wilayah Kab Bintan TA 2025 pada tanggal 29 Juli 2025
- hh. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada 29 September 2025
- ii. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025
- jj. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025
- kk. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Permenko terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 September 2025
- ll. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Industri di Batam pada 10 Juli 2025
- mm. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025
- nn. Rapat Perkembangan Usulan Tambahan Pendanaan Pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 29 Juli 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi. Selain itu, adanya tempat penyimpanan *file* berbasis *cloud*, akses terhadap dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Banyaknya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan kawasan ekonomi masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia.

2. Adanya pemberlakuan efisiensi anggaran sehingga berkurangnya anggaran yang akan dapat digunakan dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengembangan kawasan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam rangka mencapai target pengembangan kawasan ekonomi, Asdep PKEPS membagi tugas ke dalam dua tim kerja yang difokuskan pada dua substansi utama, yaitu: (1) percepatan investasi dan penyelesaian hambatan dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi; serta (2) pembiayaan alternatif, penanganan dampak sosial, dan dukungan perencanaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi.
2. Diperlukan langkah-langkah pencapaian target kinerja yang SMART.

2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

1. Undangan rapat dan Daftar Hadir;
2. Notula/ Risalah/ Berita Acara;
3. Kajian dalam bentuk kajian dalam bentuk *policy paper, policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notula Rapat Pembahasan Pengusulan PSN, dst.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan

permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil
2. konsep Alternatif Kebijakan dan Program
3. undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan rancangan alternatif kebijakan dan program.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Notulensi Pembahasan Dampak Ekonomi dari PSN Jalan Tol Trans Jawa.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian)
2. rumusan kelembagaan,
3. rumusan perencanaan program,
4. rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Revisi Permenko terkait Perubahan Daftar PSN.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

1. Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
2. Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumberdaya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
3. Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
4. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan
5. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
6. Kertas Kerja Kebijakan

7. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PSN Tahun 2025, dst.

Untuk mendapatkan hasil kinerja dalam indikator kinerja ini, dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

1. **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20$$

2. **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25$$

3. **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5$$

4. **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$$

5. **Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan tahun 2025 didasarkan pada RKP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2025. Adapun target triwulan pada IKU ini sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator kinerja 2.2 yaitu Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional yaitu sebesar 100% mencapai 100% dari target Triwulan IV Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	Persentase	80%	100%	120%

Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional diukur berdasarkan tingkat keberhasilan atas dua rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)
2. Rekomendasi kebijakan terkait perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)

Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan penyusunan regulasi kelembagaan KPPIP dan tata Kelola PSN yang telah memasuki tahapan keempat. Asdep PKEPS telah menetapkan regulasi Permenko Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Realisasi dari tahapan ini adalah menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang.

Rekomendasi kebijakan terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan penetapan regulasi perubahan daftar PSN yang telah memasuki tahapan keempat. Asdep PKEPS telah menetapkan dua regulasi yaitu Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Permenko Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Realisasi dari tahapan ini adalah menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta pelaksanaan pemantauan terhadap regulasi, kebijakan dan proyek yang telah dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh *stakeholder* sehingga diharapkan mampu dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada perbaikan mendatang.

Nilai Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:

1. Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan pertama, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20 = \frac{2}{2} \times 20 = 20$$

2. Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan kedua, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25 = \frac{2}{2} \times 25 = 25$$

3. Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan ketiga, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27.5 = \frac{2}{2} \times 27.5 = 27,5$$

4. Dua rekomendasi kebijakan telah berada pada tahapan keempat, maka didapatkan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27.5 = \frac{2}{2} \times 27.5 = 27,5$$

5. Kemudian menghitung Nilai Akhir Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas SKP} = 20\% + 20\% + 27.5\% + 27.5 = 100\%$$

Realisasi Triwulan IV didorong oleh tingginya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan proyek strategis nasional yang membuat target pada tahun 2025 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pengembangan proyek strategis nasional terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2. Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
• 1.	• Rapat koordinasi evaluasi PSN Eksisting	• Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 3 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III pelaksanaan PSN PLTS Terapung Waduk Tembesi pada tanggal 17 Okt 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta

			<p>Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional pada tanggal 21 Nov 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc., Section Harbour Road II pada tanggal 28 Nov 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada tanggal 8 Des 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pendalaman Usulan PSN Kawasan Industri Pani pada tanggal 11 Des 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada tanggal 18 Des 2025.
2.	<i>Debottlenecking</i> PSN yang ditargetkan selesai tahun 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat KOordinasi dan Monitoring PSN SPAM Semarang Baarat pada tanggal 7 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kawasan Industri Kuala Tanjung pada tanggal 8 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN sektor Transportasi pada tanggal 13 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Debottlenecking Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V pada tanggal 22 Oktober 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Percepatan Realisasi PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) pada tanggal 19 Nov 2025.
3.	<i>Monitoring dan Evaluasi PSN</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi pada tanggal 3 Oktober 2025

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III pelaksanaan PSN PLTS Terapung Waduk Tembesi pada tanggal 17 Okt 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional pada tanggal 21 Nov 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc., Section Harbour Road II pada tanggal 28 Nov 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada tanggal 8 Des 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pendalaman Usulan PSN Kawasan Industri Pani pada tanggal 11 Des 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada tanggal 18 Des 2025.
4.	Pelaksanaan Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan proses revisi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2021 serta status Proyek Strategis Nasional mengenai proyek-proyek yang ada di Kawasan Rebana pada tanggal 4 Nov 2025. • Telah dilaksanakan Executing Committee (EC) meeting Project for the Rebana Area Development which is Related to the Patimban International Port pada tanggal 4 Des 2025.
5.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permohonan Surat Keterangan Program Lisdes dan

	Program dalam PSN sesuai Perpres 109/2020		<p>BPBL sebagai Bagian PSN pada tanggal 2 Okt 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian Kendala PSN PLTA Mentarang Induk pada Ruas Jalan Perbatasan Malinau–Long Semamu KM 68–104 pada tanggal 10 Nov 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Tata Kelola Pengusulan Penugasan Pembelian Tenaga Listrik PLTSa Legok Nangka pada tanggal 24 Nov 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dukungan Pemerintah Daerah untuk KEK Pariwisata Tahun 2025 dan 2026 pada tanggal 7 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Progress Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Pariwisata pada tanggal 29 Okt 2025. • Telah dilaksanakan Rapat koordinasi terkait Dukungan terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata The Golo Mori pada tanggal 18 Nov 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Pariwisata pada tanggal 18 Des 2025.
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Agenda *Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port* Tahun 2025 pada tanggal 14 Januari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, dan Tanggul Laut) Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2025.
- c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono Section Harbour Road II.
- d. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Tanah Kuning PT KIPI pada tanggal 11 Februari 2025.
- e. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Agenda *Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port* Tahun 2025 pada tanggal 14 Januari 2025.
- f. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi dan Teknologi pada tanggal 16 Januari 2025.
- g. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Januari 2025.

- h. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri Brondong-Paciran (Kawasan Industri i-Sentra @Lamongan) pada tanggal 20 Januari 2025.
- i. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Transportasi pada tanggal 21 Januari 2025.
- j. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Jalan Tol pada 22 Januari 2025.
- k. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup PSN sektor Bina Marga di Kawasan Perbatasan dan IKN pada tanggal 7 Februari 2025.
- l. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Ketapang pada tanggal 12 Februari 2025.
- m. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (KI IGIP) pada tanggal 13 Februari 2025.
- n. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Air Minum, Air Baku dan Sanitasi Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025.
- o. Telah dilaksanakan Usulan Proyek Strategis Nasional Ekosistem Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 5 Maret 2025.
- p. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 13 Maret 2025.
- q. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Maret 2025.
- r. Telah dilaksanakan *Desk* Keterpaduan Infrastruktur tentang Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan 8% (*Case Study* Pulau Jawa: Kawasan Rebana) Pra-Musrenbangnas RKP 2026 Bidang Infrastruktur pada tanggal 20 Maret 2025.
- s. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025
- t. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025
- u. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
- v. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025
- w. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 14 Agustus 2025.
- x. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) KI IHIP, KI IKIP dan KI IMIP pada tanggal 23 Juni 2025.
- y. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025
- z. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025
- aa. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025
- bb. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025
- cc. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025

- dd. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025
- ee. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 12 September 2025
- ff. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025
- gg. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025
- hh. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada 12 Agustus 2025
- ii. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025.
- jj. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2025.
- kk. Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 September 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan PSN. Selain itu, adanya tempat penyimpanan file berbasis cloud, akses terhadap dokumen dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Banyaknya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelesaian PSN masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan langkah-langkah pencapaian target kinerja yang SMART.
2. Untuk pencapaian target penyelesaian PSN, Asdep PPP dalam hal ini KPPIP dibantu oleh Tim PMO dan Tim PMO Badan Usaha.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Latar Belakang

Terwujudnya layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang berkualitas merupakan sasaran strategis perspektif *internal business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis ; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis dan (d) pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata Kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Kepuasan} \\ & \text{Layanan Koordinasi,} \\ & \text{Sinkronisasi dan} \\ & \text{Pengendalian} \end{aligned} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \right)$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan KSP pada tahun 2025 adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2025. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah

dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis memiliki indeks kepuasan 3,93 dari 4 berdasarkan hasil survei pada semester II tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja ditunjukkan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Indeks	3 dari 4	3,93 dari 4	120%

Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan hingga 8 Januari 2025 secara daring melalui tautan Google Form. Pada 12 Januari 2025 telah disampaikan rekapitulasi hasil survei kepuasan layanan yang terdiri atas 2 aspek yaitu aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan aspek kepuasan substansi layanan. Untuk survei kepuasan layanan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan jumlah responden 29 orang mendapatkan nilai indeks kepuasan sebesar 3,93 dari 4.

Capaian kinerja Triwulan IV tahun 2025 melebihi capaian realisasi target 2025. Mengingat berjalan lancarnya survei yang dilakukan pada Triwulan IV ini, maka diprediksikan Survei Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> Telah disampaikan Surat Permintaan Partisipasi Survei Kualitas Pelayanan Asdep PKEPS Semester II Tahun 2025 pada 8 Januari 2026.

	kebijakan Semester 2 tahun 2025		<ul style="list-style-type: none"> • Telah disampaikan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Asdep PKEPS Semester II Tahun 2025 pada 12 Januari 2026.
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan layanan SKP semester 2 tahun 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan layanan SKP semester II Tahun 2025 pada 13 Januari 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan rapat internal persiapan pelaksanaan survei layanan SKP semester 1 Tahun 2025 pada 28 Maret 2025.
- b. Telah disusun daftar data responden survei layanan SKP pada Januari hingga Maret 2025 yang ditargetkan berasal dari Kementerian/Lembaga instansi terkait pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
- c. Telah dilaksanakan rapat internal persiapan kebutuhan untuk pelaksanaan survei layanan SKP semester 1 Tahun 2025 pada 30 Juni 2025.
- d. Telah disampaikan Surat Permintaan Partisipasi Survei Kualitas Pelayanan Asdep PKEPS Semester 1 Tahun 2025 pada 4 Juli 2025.
- e. Telah disampaikan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Asdep PKEPS Semester 1 Tahun 2025 pada 14 Juli 2025
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan layanan SKP semester 1 Tahun 2025 pada 14 Juli 2025
- g. Telah dilaksanakan pengumpulan data responden survei kepuasan layanan koordinasim sinkornisasi, dan pengendalian kebijakan Semester II pada 29 Agustus dan 30 September 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei yang menggunakan Google Form. Pengelolaan tata persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis perkantoran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terbatasnya waktu pelaksanaan survet sehingga perlu dukungan yang kuat dari para stakeholder yang menjadi mitra kerja yang mendapatkan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan

dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan stakeholder agar diberikan kemudahan menjadi responden untuk mengisi survei.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Dan Proyek Strategis

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Dan Proyek Strategis di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis ditunjukkan oleh pencapaian 1 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Dan Proyek Strategis

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Baik. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan.

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja. Selain itu, terdapat pelaksanaan anggaran belanja yang digunakan dalam unit kerja dengan tepat sasaran dan efektif.

Formula yang digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi adalah Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Asdep PKEPS Tahun 2025. Adapun target triwulan sebesar 100% atau mencapai 5 paket dokumen. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator kinerja 4.1 yaitu sebesar 100% mencapai 120% dari target Triwulan IV Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Dan Proyek Strategis	Persentase	85%	100%	120%

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Asdep PKEPS telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Uraian Rincian Output, Dokumen Renstra, Sasaran Kinerja Pegawai, Laporan Triwulan IV Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025. Dalam rangka optimalisasi implementasi Srikandi, Asdep PKEPS telah memproses naskah masuk dan naskah keluar melalui Srikandi secara optimal. Asdep PKEPS juga telah melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Dialog Kinerja. Selanjutnya Asdep PKEPS telah melakukan optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO.

Realisasi Triwulan IV didorong oleh tingginya pelaksanaan penyusunan dokumen reformasi birokrasi untuk unit kerja yang membuat target pada tahun 2025 dapat terpenuhi. Mengingat pelaksanaan penyusunan dokumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan maka diprediksikan pelaksanaan reformasi birokrasi terus stabil sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Dan Proyek Strategis			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan indikator pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none">Telah dilaksanakan SDM Series #2 : Kebijakan Kehadiran Kerja Pegawai pada 3 November 2025

			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran pada 5 November 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Internal Deputi 5 pada 18 November 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Internal Pembahasan Program dan Anggaran Kerja PKEPS 2026 pada 11 Desember 2025 • SDM Series #6 : Sosialisasi Kenaikan Pangkat pada 9 Desember 2025 • Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 pada 22 Desember 2025 • Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada 23 Desember 2025 • Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan dan tahunan sesuai dengan rencana aksi. • Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan diupload di laman kinerja.ekon.go.id
2.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Breakfast Meeting Pembahasan Progres Pelaksanaan Program kerja Deputi V dan Pending Issue pada 7 November 2025 • Telah dilaksanakan Diskusi Teknis Rancangan Rencana Strategis Deputi V Tahun 2025-2029 pada 10 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2025 pada 22 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Internal Deputi V terkait Usulan Penyesuaian Nomenklatur Asisten Deputi pada 30 Desember 2025 • Telah ditetapkan DIPA Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan program Tahun Anggaran 2026 pada 31 Desember 2025

3.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional setiap triwulan pada tahun 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan Sosialisasi Agen Perubahan pada 10 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal Pengendalian dan Evaluasi RKP pada 22 Oktober 2025 • Telah dilaksanakan Diskusi Kegiatan Agen Perubahan Deputi V pada 7 November 2025 • Telah dilaksanakan Entry Meeting Pemantauan Hasil Pemeriksaan Internal pada 5 Desember 2025 • Telah dilaksanakan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada 3 November 2025 dan 5 Desember 2025
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Srikandi pada bulan Januari hingga Desember 2025 dengan 2.088 naskah masuk dan 1.022 naskah keluar pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Internal Dialog Kinerja Pembahasan Program Kerja di Lingkungan Deputi V pada 6 Januari 2025.
- b. Telah dilaksanakan Rapat Dialog Kinerja Deputi V pada 31 Januari 2025.
- c. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan IKU Tahun 2025 Deputi V pada 7 Maret 2025.
- d. Telah dilaksanakan Diskusi Internal Asdep PKEPS terkait IKU dan PK pada 10 Maret 2025.
- e. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penajaman IKU Deputi V pada 13 Maret 2025.
- f. Telah dilaksanakan Rapat Internal Persiapan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Usulan Buka Blokir Anggaran pada 21 Maret 2025.
- g. Telah dilaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kinerja pejabat eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada 2 Januari 2025.
- h. Telah dilaksanakan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai pada 2 Januari 2025.
- i. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penataan struktur SRIKANDI di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian pada 17 Januari 2025.
- j. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran TA 2025 pada 30 Januari 2025.
- k. Telah dilaksanakan Rapat Internal Pembahasan Efisiensi Anggaran TA 2025 pada 3 Februari 2025.

- l. Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Akun Belanja Blokir pada 17 Februari 2025.
- m. Telah dilaksanakan Rapat Reviu Draf Permenko tentang Klasifikasi Arsip pada 11 Maret 2025.
- n. Telah dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan Kehadiran Kerja Pegawai pada 17 Maret 2025.
- o. Telah dilaksanakan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Relaksasi Blokir Efisiensi TA 2025 pada 26 Maret 2025.
- p. Tidak ada kendala dan hambatan dalam penggunaan website ekon-Go.
- q. Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan I disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
- r. Penggunaan Srikandi pada bulan Januari hingga Maret 2025 dengan 71 naskah masuk dan 209 naskah keluar pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
- s. Telah dilaksanakan pengisian SKP Triwulan I disertai dengan bukti dukung.
- t. Telah dikeluarkan Surat Keputusan KPA Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Pengelola Keuangan, dan Petugas Administrasi terkait pengelolaan kode anggaran 5266 dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
- u. Telah dilaksanakan kegiatan Pembekalan Kandidat Agen Perubahan Tahun 2025 pada 25 Juni 2025
- v. Telah dilaksanakan Sosialisasi Platform ASN Digital dan Penerapan Multi-factor Authentication (MFA) pada 10 April 2025
- w. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Kinerja ASN pada 2 Juni 2025
- x. Telah dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi e-Monev Tahun 2025 pada 21 April 2025
- y. Telah dilaksanakan Evaluasi Pengisian e-Monev dan Kick Off Verifikasi Sismonev pada 26 Mei 2025
- z. Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan survei SPIP terkait permintaan data untuk survei pada 12 Juni 2025
- aa. Telah dilaksanakan pengumpulan data responden pelaksanaan survei SPIP pada 20 Juni 2025
- bb. Telah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan 2025 pada 5 Mei 2025
- cc. Telah dilaksanakan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 pada 16 Mei 2025
- dd. Telah dilaksanakan Penyampaian Update Fitur Validasi Data Pengguna Digit pada 30 Mei 2025
- ee. Telah dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi Digipay Satu Versi 2.0 pada 3 Juni 2025
- ff. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Mekanisme Sewa Semester II TA 2025 pada 11 Juni 2025
- gg. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Arsip Aktif Tahun 2025 pada 16 Mei 2025
- hh. Telah dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Arsip Aktif pada 2 Juni 2025

- ii. Telah dilaksanakan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal 2025 pada 10 Juni 2025
- jj. Telah dilaksanakan Validasi Formulir ASKI Pengawasan Kearsipan Internal 2025 pada 18 Juni 2025
- kk. Telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Penggunaan Akun SRIKANDI pada Seluruh Pegawai Kemenko Perekonomian pada 18 Juni 2025
- ll. Telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi dan Manual Indikator Kinerja Utama pada 16 Juni 2025
- mm. Telah dilaksanakan rapat internal pembahasan tim kerja dalam lingkungan Asdep PKEPS pada 28 April 2025
- nn. Telah dilaksanakan Rapat Internal Pembagian Tim Kerja pada 27 Mei 2025
- oo. Telah dilaksanakan Rapat Internal Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan I pada tanggal 13 Juni 2025
- pp. Telah ditetapkan Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan pada 30 Juni 2025 dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2025.
- qq. Telah ditetapkan Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Implementasi Pembiayaan Infrastruktur Skema Pembiayaan Alternatif pada 30 Juni 2025 dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2025.
- rr. Telah dilakukan penyusunan dan penetapan tim kerja pada lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dengan cross-cutting tugas lintas Asisten Deputi sesuai Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2025 pada 1 Juli 2025.
- ss. Telah dilaksanakan penyusunan dan penyampaian manajemen risiko Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Tahun 2025 pada 24 Juli 2025.
- tt. Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan dan tahunan sesuai dengan rencana aksi.
- uu. Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan diupload di laman kinerja.ekon.go.id
- vv. Telah dilaksanakan penyampaian TOR dan RAB sebagai bahan penyusunan Renja dan RKA-K/L Tahun 2026 pada 31 Juli 2025.
- ww. Telah dilaksanakan Revisi sesuai Penyesuaian dan Perbaikan atas TOR dan RAB Tahun Anggaran 2026 pada 30 September 2025
- xx. Telah dilaksanakan penyampaian revidu Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I dan II serta proyeksi RPD Triwulan IV pada 6 Oktober 2025.
- yy. Telah dilaksanakan Coaching Clinic Sitem dan Pembayaran melalui Inaproc Versi 6 pada Kemenko Bidang Perekonomian pada 21 Juli 2025
- zz. Telah dilaksanakan penyampaian revidu pemetaan program kerja dan renaksi RB Tematik pada 11 September 2025
- aaa. Telah dilaksanakan penyampaian usulan Revisi Renja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025 pada 20 September 2025
- bbb. Telah dilaksanakan Coaching Clinic penyusunan Pohon Kinerja Eselon 1 pada 29 September 2025

ccc. Telah dilaksanakan Pemutakhiran Sasaran, Indikator dan Target pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 pada 2 Oktober 2025.

Telah diterima pedoman pelaksanaan penyelesaian tagihan akhir tahun anggaran 2026 pada 7 Oktober 2025.

ddd. Penggunaan Srikandi pada bulan Januari hingga September 2025 dengan 419 naskah masuk dan 957 naskah keluar pada Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dengan terdapat tempat penyimpanan file berbasis *cloud* dengan pemberian akses dokumen yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan tata persuratan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja, dilakukan lebih banyak koordinasi yang dilaksanakan secara daring/*online* sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercipta dengan baik pada DIPA Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum ada kendala dalam pelaksanaan RB. Terdapat beberapa penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.
2. Untuk kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, terdapat rencana kegiatan yang belum dapat dilaksanakan yang menyebabkan adanya perubahan realisasi anggaran

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi atas penggunaan anggaran agar sesuai dengan target.
3. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Jakarta, 9 Januari 2026

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis,



Suroto

NIP 197004121996031001